

MAKALAH

PRAKTEK SIYASAH PADA MASA ALI BIN ABI THALIB

MATA KULIAH : FIQIH SIYASAH DAN JINAYAH
DOSEN PENGAMPU : FITRIANI, M.H



DISUSUN OLEH

- A. MUSLIMIN
- B. AMAR MAULANA
- C. SELFI

PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
STAI AL-AMIN DOMPU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah yang berjudul *Praktek Siyasah pada Masa Ali Bin Abi Thalib* ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan akademik dan sebagai wujud upaya memperdalam pemahaman mengenai sejarah dan praktik politik Islam pada masa awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan khususnya mengenai konsep siyasah dalam Islam dan implementasinya pada masa *Ali Bin Abi*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Siyasah	3
B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam	4
C. Biografi Singkat Ali bin Abi Thalib	6
D. Praktek Siyasah pada Masa Ali bin Abi Thalib	7
E. Tantangan-Tantangan Politik	9
BAB III. PENUTUP	11
A. KESIMPULAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah pemerintahan Islam, periode Khulafaur Rasyidin merupakan fase penting yang menjadi landasan konsep kepemimpinan ideal berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Di antara keempat khalifah tersebut, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib memiliki karakteristik tersendiri karena berlangsung dalam situasi politik yang sangat kompleks. Ia menjadi khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan mewarisi kekuasaan dalam keadaan penuh fitnah, perpecahan, dan konflik internal di kalangan umat Islam (Hitti, 2002).

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang cerdas, zuhud, adil, dan berani. Ia merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, baik secara keilmuan maupun spiritual. Kualitas ini membuatnya sangat dihormati oleh umat Islam hingga saat ini. Namun, saat memimpin, Ali dihadapkan pada tantangan berat seperti pemberontakan kelompok-kelompok internal umat Islam, termasuk Perang Jamal, Perang Shiffin, dan pemberontakan Khawarij (Al-Mawardi, 2000). Tantangan-tantangan tersebut menuntutnya untuk menerapkan strategi politik atau *siyasah* yang tidak hanya cerdas tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam.

Konsep *siyasah* dalam Islam bukanlah sekadar praktik kekuasaan, melainkan cara mengelola urusan umat berdasarkan keadilan dan kemaslahatan umum. Siyasah Islami menempatkan pemimpin sebagai pelayan rakyat dan penjaga agama. Dalam konteks ini, Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai pemimpin yang berupaya keras menerapkan *siyasah syar'iyah* meskipun berada dalam tekanan politik dan sosial yang luar biasa. Ia menolak nepotisme, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta mengutamakan musyawarah dan dialog sebagai dasar pengambilan kebijakan (Zahrani, 2010).

Kepemimpinan Ali menjadi kajian menarik dalam ilmu politik Islam karena menampilkan wajah kepemimpinan yang teguh dan prinsipil di tengah ketidakstabilan. Dalam masa kepemimpinannya, Ali lebih memilih keadilan daripada popularitas politik. Ia tidak ragu memecat para pejabat warisan dari masa Utsman jika mereka dianggap tidak kompeten atau korup, meskipun hal itu mengurangi dukungan terhadap dirinya (Nasution, 1995). Bahkan, ketika menghadapi lawan-lawannya yang berasal dari kalangan terhormat seperti Aisyah, Thalhah, dan Zubair, Ali tetap mengedepankan etika dan menjauhi tindakan represif.

Latar belakang ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib layak untuk dikaji dari sisi praksis *siyasah*. Studi ini bukan hanya penting untuk memahami sejarah, tetapi juga memberi inspirasi tentang bagaimana seharusnya pemimpin Muslim mengelola kekuasaan dalam bingkai nilai-nilai ilahiah. Dalam era modern yang sering diwarnai krisis moral dalam kepemimpinan, refleksi terhadap kepemimpinan Ali menjadi relevan sebagai model etis dan religius dalam menjalankan pemerintahan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik *siyasah* diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana kebijakan politiknya dalam menghadapi konflik, serta bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam langkah-langkah strategisnya sebagai pemimpin umat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian *Siyasah* ?
2. Bagaimana Konsep Kepemimpinan dalam Islam ?
3. Bagaimana Biografi Singkat Ali bin Abi Thalib ?
4. Bagaimana Praktek *Siyasah* pada Masa Ali bin Abi Thalib ?
5. Apa Tantangan-Tantangan Politik ?

C. TUJUAN

1. Apa Pengertian *Siyasah*
2. Bagaimana Konsep Kepemimpinan dalam Islam
3. Bagaimana Biografi Singkat Ali bin Abi Thalib
4. Bagaimana Praktek *Siyasah* pada Masa Ali bin Abi Thalib
5. Apa Tantangan-Tantangan Politik

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SIYASAH

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab سِيَاسَةٌ – يَسُوسُ – سَاسَ yang berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat. Secara etimologis, siyasah berarti tindakan atau strategi untuk memelihara dan mengatur urusan rakyat. Dalam konteks pemerintahan Islam, siyasah berarti sistem kepemimpinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat berdasarkan nilai-nilai Islam (Al-Mawardi, 2000).

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, siyasah adalah pelaksanaan kekuasaan secara sah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip keadilan dan maslahat (Al-Mawardi, 2000). Ini berarti bahwa siyasah tidak semata-mata berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga erat kaitannya dengan moralitas, hukum, dan tanggung jawab sosial pemimpin terhadap rakyat.

Dalam pandangan klasik Islam, siyasah terbagi ke dalam beberapa jenis:

1. **Siyasah Syar'iyah:** Yaitu politik yang berdasarkan pada syariat Islam. Tujuannya adalah menjaga maqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam), seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Ibn Taymiyyah, 1995).
2. **Siyasah Dusturiyyah:** Berkenaan dengan tata negara dan konstitusi, termasuk sistem kekhalifahan dan struktur administrasi negara.
3. **Siyasah Dauliyyah:** Menyangkut hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri negara Islam terhadap negara lain.
4. **Siyasah Maliyyah:** Mengatur masalah keuangan negara, termasuk sistem zakat, baitul mal, dan distribusi kekayaan.

Dalam praktiknya, siyasah dalam Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang formal kekuasaan, melainkan juga dari sudut pandang etika dan tanggung jawab pemimpin. Oleh karena itu, siyasah sangat menekankan prinsip keadilan (ʿadl), musyawarah (shura), dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (Q.S. An-Nisa: 58, Al-Qur'an al-Karim)

Dalam literatur modern, siyasah juga dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang memadukan nilai-nilai spiritual dan norma hukum dalam pengelolaan kekuasaan. Berbeda dengan politik sekuler, siyasah Islam menolak pemisahan antara agama dan negara. Oleh

sebab itu, seorang pemimpin dalam sistem Islam tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai penjaga moral dan pelindung umat.

Menurut Zahrani (2010), siyasah dalam Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, keadilan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, siyasah bukan alat untuk mencapai kekuasaan pribadi, tetapi merupakan bentuk pelayanan publik yang suci.

Oleh karena itu, memahami konsep siyasah menjadi penting dalam menilai bagaimana seorang khalifah seperti Ali bin Abi Thalib memimpin umat dalam kondisi yang penuh gejolak. Pemahaman terhadap konsep ini juga menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

B. KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Kepemimpinan dalam Islam (*al-imamah* atau *al-ri'ayah*) merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Islam tidak memisahkan antara agama dan urusan publik, sehingga seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administrasi negara, tetapi juga sebagai penegak hukum syariat, penjaga moral umat, dan pelayan kemaslahatan masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam merupakan perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT dengan mengelola urusan umat secara adil, bijak, dan penuh tanggung jawab (Al-Mawardi, 2000).

1. Landasan Kepemimpinan dalam Islam

Islam meletakkan dasar kepemimpinan pada prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan (*'adl*), amanah (kepercayaan), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Hal ini dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia di bumi untuk menegakkan keadilan dan mengatur kehidupan berdasarkan kehendak Allah SWT.

Hadis Nabi juga menyebutkan:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan beban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak.

2. Syarat-Syarat Kepemimpinan dalam Islam

Menurut para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun, seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya:

- Muslim dan adil
- Berilmu dan bijaksana
- Memiliki kemampuan (kuat dan amanah)
- Memiliki pemahaman terhadap syariat Islam
- Dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan maslahat umat

Kriteria-kriteria tersebut bertujuan agar pemimpin tidak hanya kuat dalam administrasi, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai Islam dalam setiap kebijakan yang diambil (Ibn Khaldun, 1984).

3. Tujuan Kepemimpinan dalam Islam

Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah menegakkan agama dan mengatur dunia dengan adil, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* karya Ibn Taymiyyah. Kepemimpinan adalah alat untuk menciptakan ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan, serta menjaga dari kezaliman dan kerusakan (Ibn Taymiyyah, 1995).

Kepemimpinan juga bertujuan menciptakan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), di mana pemimpin menjadi jembatan antara rakyat dan pelaksanaan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sosial.

4. Model Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin

Model kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan contoh utama bagi umat Islam. Kepemimpinan beliau tidak hanya berhasil dalam membangun masyarakat Madinah, tetapi juga menunjukkan prinsip-prinsip akhlak, musyawarah, dan keadilan yang tinggi.

Para khalifah setelah Nabi, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, meneruskan model kepemimpinan ini. Abu Bakar dikenal dengan kejujurannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan kedermawanannya, dan Ali bin Abi Thalib dengan keadilannya. Ali secara khusus memperlihatkan sikap pemimpin yang konsisten mempertahankan kebenaran meski menghadapi konflik internal yang hebat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam (Zahrani, 2010).

5. Konsep Imamah dan Kekuasaan sebagai Amanah

Imamah atau kekhalifahan dalam Islam bukanlah bentuk kekuasaan absolut. Kepemimpinan dalam Islam lebih bersifat sebagai *amanah*, bukan *mulk* (kekuasaan warisan). Oleh karena itu, pemimpin harus memperhatikan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi

mereka, serta menjalankan tugasnya berdasarkan syariat, bukan hawa nafsu atau tekanan politik (Nasution, 1995).

Dalam konteks Ali bin Abi Thalib, konsep kepemimpinan ini terlihat jelas. Ia selalu mengedepankan kejujuran, kebenaran, dan kesetaraan hukum, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang dekat secara pribadi namun melakukan kesalahan.

C. BIOGRAFI SINGKAT ALI BIN ABI THALIB

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam, dikenal sebagai khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin dan termasuk sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah **Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim**, berasal dari Bani Hasyim, salah satu kabilah terkemuka di Makkah. Ia lahir pada tahun 600 M di kota Makkah dan dibesarkan di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sepupunya sekaligus pengasuhnya setelah ayahnya, Abu Thalib, mengalami kesulitan ekonomi (As-Salabi, 2006).

Ali merupakan orang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk Islam. Ia tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, dan sangat mencintai ilmu. Kesetiannya kepada Nabi Muhammad SAW tidak perlu diragukan. Ia turut serta dalam berbagai peristiwa penting sejak masa awal dakwah Islam hingga wafatnya Nabi. Ali dikenal karena keberaniannya dalam perang-perang besar seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Julukannya yang terkenal adalah **“Asadullah al-Ghalib”** (Singa Allah yang Perkasa), karena keberaniannya di medan perang (Lings, 2001).

Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Ali diangkat sebagai khalifah oleh mayoritas kaum Muslimin pada tahun 656 M. Masa kepemimpinannya dipenuhi tantangan besar, terutama konflik internal umat Islam, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, serta munculnya kelompok Khawarij. Meskipun demikian, Ali tetap berusaha menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebenaran sesuai ajaran Islam.

Ali dikenal sebagai sosok yang adil, bijaksana, dan memiliki kedalaman ilmu. Banyak perkataannya yang menjadi sumber inspirasi dan rujukan dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fiqh, tafsir, dan tasawuf. Ia juga dikenal sebagai salah satu sumber utama ilmu dalam mazhab Syiah.

Ali wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 H (661 M) setelah ditikam oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam ketika hendak memimpin salat subuh di Kufah, Irak. Ia wafat dalam usia sekitar 63 tahun dan dimakamkan di Najaf, yang kini menjadi salah satu kota suci dalam tradisi Syiah (Hodgson, 1974).

D. PRAKTEK SIYASAH PADA MASA ALI BIN ABI THALIB

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menempati posisi penting dalam sejarah politik Islam, karena berlangsung pada masa yang penuh dengan ujian internal dan disintegrasi politik pasca wafatnya khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya (656–661 M) ditandai dengan munculnya konflik antarumat Islam dan berbagai tantangan serius terhadap stabilitas politik dan sosial umat. Dalam kondisi penuh gejolak tersebut, Ali tetap berupaya menerapkan prinsip-prinsip siyasah Islamiyah secara konsisten, berbasis pada keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umat.

1. Pemilihan dan Legitimasi Kepemimpinan

Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah melalui proses pemilihan yang didasarkan pada musyawarah umat, bukan penunjukan langsung sebagaimana Abu Bakar maupun bentuk majelis syura sebagaimana Umar. Setelah terbunuhnya Utsman, masyarakat Madinah – terutama para tokoh anshar dan muhajirin – mendesak Ali untuk memimpin umat Islam. Meski awalnya menolak karena menyadari beratnya tantangan, Ali akhirnya menerima amanah tersebut dengan syarat bahwa ia akan memimpin berdasarkan prinsip kebenaran dan bukan tekanan massa (As-Salabi, 2006).

Pemilihan Ali memperlihatkan bentuk praksis siyasah Islam yang berpijak pada legitimasi moral dan sosial, bukan ambisi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kekuasaan tidak dicari, tetapi diterima sebagai amanah jika diberikan oleh umat.

2. Kebijakan Reformasi Administrasi

Salah satu langkah awal yang diambil Ali adalah mereformasi birokrasi yang diwarisi dari masa Utsman. Ia mencopot sebagian besar gubernur dan pejabat yang dianggap tidak adil atau nepotis. Misalnya, ia mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan dari jabatannya sebagai Gubernur Syam karena dianggap sebagai sumber pembangkangan terhadap pusat pemerintahan. Keputusan ini menimbulkan resistensi, tetapi Ali tetap teguh dalam komitmennya terhadap prinsip keadilan.

Ia juga menolak menggunakan harta negara untuk menyenangkan pendukungnya. Dalam pidatonya, Ali mengatakan:

"Seandainya harta itu milikku, aku akan membaginya sama rata. Apalagi ia adalah milik Allah." (Nahj al-Balaghah)

Hal ini mencerminkan idealisme Ali yang tinggi dalam memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publik, serta memperlihatkan bentuk **siyasah maliyyah** (politik keuangan) yang adil dan transparan (Al-Mubarakfuri, 2001).

3. Menghadapi Konflik Internal dan Pemberontakan

Masa pemerintahan Ali diwarnai oleh tiga konflik besar: **Perang Jamal**, **Perang Shiffin**, dan **fitnah Khawarij**. Ketiganya menjadi ujian terhadap kemampuan Ali dalam mengelola konflik secara politik dan spiritual. Dalam Perang Jamal, Ali berusaha menghindari pertumpahan darah dengan mengajak musyawarah Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Namun, konflik tidak terhindarkan karena provokasi pihak ketiga.

Pada Perang Shiffin, Ali berhadapan dengan pasukan Muawiyah. Meskipun Ali hampir memenangkan perang, namun keputusan taktik musuh mengangkat mushaf Al-Qur'an sebagai tanda arbitrase (tahkim) menyebabkan pasukannya sendiri terpecah. Sebagian tidak setuju dan kemudian membentuk kelompok **Khawarij**, yang kemudian memberontak kepada Ali.

Dalam menghadapi Khawarij, Ali tetap mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Ia mengutus Ibn Abbas untuk berdialog dan meluruskan pemahaman mereka. Namun ketika mereka tetap membangkang dan membunuh kaum Muslimin, Ali mengambil langkah militer tegas dalam peristiwa **Perang Nahrawan**.

Semua tindakan ini menunjukkan bahwa Ali menerapkan **siyasah syar'iyah**, yaitu kebijakan publik berdasarkan maslahat dan prinsip Islam, dengan menyeimbangkan antara diplomasi, hukum, dan kekuatan militer jika diperlukan (Ibn Taymiyyah, 1995).

4. Penegakan Hukum dan Keadilan

Ali dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tidak pandang bulu. Dalam banyak riwayat, ia menolak memberikan kekhususan atau perlindungan istimewa kepada kerabatnya jika bersalah. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika ia bersengketa dengan seorang Yahudi terkait baju perang. Ketika di pengadilan, Ali tidak mendapatkan keistimewaan sebagai khalifah dan tetap tunduk pada putusan hakim yang tidak berpihak.

Dalam pidatonya, Ali berkata:

"Orang yang paling lemah di sisiku adalah yang mampu memperoleh haknya dariku, walau ia paling tidak berdaya." (Nahj al-Balaghah)

Ini adalah wujud nyata dari **siyasah qadha'iyah** (politik kehakiman) dalam Islam, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Praktek siyasah Ali bin Abi Thalib memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab moral, dan kesediaan menanggung risiko demi menjaga integritas umat. Meski masa pemerintahannya singkat dan penuh konflik, Ali meninggalkan warisan pemikiran dan teladan kepemimpinan yang sangat berharga bagi konsep politik Islam hingga hari ini.

E. TANTANGAN-TANTANGAN POLITIK

Masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656–661 M) merupakan salah satu periode paling menantang dalam sejarah kekhalifahan Islam. Ali tidak hanya menghadapi persoalan internal umat yang kompleks, tetapi juga harus mengelola fragmentasi politik, konflik bersenjata, dan dinamika sosial yang penuh gejolak. Tantangan-tantangan ini secara langsung menguji konsep *siyasaḥ syar'iyah* yang ia terapkan dan menjadi pembelajaran penting dalam studi kepemimpinan Islam.

1. Ketidakstabilan Pasca Pembunuhan Utsman

Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menjadi pemicu utama ketidakstabilan politik di Madinah dan wilayah kekuasaan Islam. Ketika Ali diangkat sebagai khalifah, ia mewarisi umat Islam yang telah terpecah secara politik dan emosional. Sebagian besar kelompok menuntut pembalasan terhadap pembunuh Utsman sebelum mengakui kekhalifahan Ali, sementara Ali justru memilih untuk menstabilkan negara terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum. Ketegangan inilah yang memicu perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu (As-Salabi, 2006).

2. Konflik Internal dan Perang Saudara

Ali menghadapi tiga perang besar dalam waktu singkat:

- **Perang Jamal (656 M):** Dihadapi oleh Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang menuntut qishas atas pembunuh Utsman. Meskipun Ali berusaha berdamai, konflik bersenjata tidak dapat dihindari.
- **Perang Shiffin (657 M):** Melibatkan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dari Syam yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Perang ini berakhir dengan arbitrase (tahkim), yang justru menimbulkan perpecahan lebih lanjut.
- **Perang Nahrawan (658 M):** Melawan kaum Khawarij, kelompok ekstrem yang mengkafirkan Ali dan mengangkat senjata karena tidak menerima hasil arbitrase.

Ketiga konflik ini bukan hanya tantangan militer, tetapi juga menguji daya tahan politik, diplomasi, dan keadilan sosial dalam sebuah negara Islam. Ali harus membuat keputusan-keputusan besar dalam situasi sangat kompleks, di mana kebenaran dan maslahat umat harus dikedepankan.

3. Pembangkangan Gubernur dan Oposisi Politik

Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai Gubernur Syam, menjadi oposisi politik paling kuat. Ia menolak dicopot oleh Ali, bahkan membangun kekuatan politik dan militer tandingan. Ini menciptakan konflik kepemimpinan ganda yang mengancam integritas negara.

Upaya Ali untuk mencopot pejabat korup dari warisan pemerintahan sebelumnya justru menciptakan resistensi besar di daerah-daerah.

Selain itu, munculnya Khawarij dari internal pendukung Ali sendiri menunjukkan betapa rapuhnya kesetiaan politik dalam masyarakat Muslim waktu itu. Tantangan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik siyasah, seorang pemimpin tidak hanya harus mampu melawan musuh luar, tetapi juga mengelola kekecewaan internal yang bisa meledak menjadi pemberontakan.

4. Krisis Kepercayaan dan Fragmentasi Sosial

Masyarakat Islam saat itu terbagi dalam berbagai faksi: pendukung Ali (Syiah), pendukung Muawiyah (Umayyah), kelompok netral (Abstinensia), dan kaum Khawarij (ekstrem). Fragmentasi ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat, memperlemah efektivitas kebijakan, serta menyulitkan distribusi otoritas politik.

Ali memilih pendekatan dakwah, musyawarah, dan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi tantangan ini, tetapi keterbatasan sumber daya, loyalitas militer yang goyah, dan pengaruh politik regional memperparah kondisi.

5. Akhir Kepemimpinan dan Pembunuhan

Pada tahun 661 M, Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota Khawarij, saat sedang shalat di Masjid Kufah. Pembunuhan ini menandai akhir dari masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dan awal dari era kekuasaan dinasti, yakni Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah.

Kematian Ali memperlihatkan betapa kompleks dan bahayanya situasi politik pada masa itu. Ali meninggal dalam keadaan memegang prinsip dan tidak menjual kekuasaan demi kompromi politik yang menyimpang dari syariat.

Tantangan-tantangan politik yang dihadapi Ali bin Abi Thalib menunjukkan betapa sulitnya menjaga stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan Islam di tengah situasi yang terfragmentasi. Namun, melalui keteguhan prinsip, kejujuran, dan keimanan, Ali tetap menjadi simbol kepemimpinan ideal dalam sejarah Islam. Meski gagal menyatukan seluruh umat secara politik, warisannya dalam hal moralitas kepemimpinan dan prinsip siyasah tetap abadi hingga kini.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu periode yang paling menantang sekaligus mengandung pelajaran penting dalam sejarah politik Islam. Dalam konteks *siyasah syar'iyah* atau politik syariat, Ali menerapkan prinsip-prinsip Islam yang murni dengan berpegang pada nilai keadilan, kejujuran, dan musyawarah. Meskipun beliau menghadapi berbagai tantangan besar—seperti konflik internal umat, pemberontakan politik, hingga fragmentasi sosial—Ali tetap konsisten memegang prinsip-prinsip keislaman dalam setiap kebijakan dan tindakan politiknya.

Ali bin Abi Thalib bukan hanya seorang khalifah, tetapi juga cendekiawan, ahli hukum, dan pemimpin spiritual. Keputusannya untuk mendahulukan stabilitas negara dan menghindari balas dendam politik mencerminkan kebijaksanaan dan kesadaran beliau akan pentingnya kemaslahatan umat di atas kepentingan golongan. Perang Jamal, Shiffin, dan pemberontakan Khawarij membuktikan bahwa politik pada masa itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan konflik ideologis dan sosial yang rumit.

Siyasah pada masa Ali bin Abi Thalib juga menunjukkan bahwa dalam Islam, politik tidak bisa dipisahkan dari moral dan nilai-nilai agama. Keberanian beliau menolak nepotisme, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta menolak kompromi dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak adil menjadi warisan berharga dalam studi kepemimpinan Islam.

Dari pengalaman kepemimpinan Ali, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari keberhasilan menyatukan wilayah atau mempertahankan kekuasaan, tetapi dari sejauh mana ia mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam situasi paling sulit sekalipun. Warisan pemikiran dan praktek siyasah Ali tetap relevan sebagai model kepemimpinan etis dan berbasis nilai dalam dunia Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Salabi, A. M. (2012). *Biografi Ali bin Abi Thalib: Kisah Hidup Sang Singa Allah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Diakses dari <https://pustakaal-kautsar.com>
- Hidayatullah, A. (2020). *Konsep Siyasa dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 15(2), 112–125. Diakses dari <https://jurnalpolitik.uinjkt.ac.id/index.php/jppi/article/view/1120>
- Junaedi, M. (2022). *Pemikiran Politik Islam: Studi Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 6(1), 89–100. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/politika>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Sejarah Islam: Khulafaur Rasyidin*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/sejarah/khulafaur-rasyidin>
- Marzuki, A. (2021). *Siyasa Syar'iyah: Politik dalam Islam dan Relevansinya Masa Kini*. *Jurnal Al-Ahkam*, 19(1), 57–70. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/7399>
- Syaharul, I. (2020). *Ali bin Abi Thalib: Kepemimpinan dalam Badai Fitnah*. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/121321/ali-bin-abi-thalib--kepemimpinan-dalam-badai-fitnah>
- Yusuf, M. (2019). *Pemikiran Politik Islam Klasik: Studi Atas Masa Khulafaur Rasyidin*. *Jurnal Islamika*, 17(2), 145–160. Diakses dari <https://ejournal.umma.ac.id/index.php/islamika/article/view/85>